

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera**

**Aisyah A Zzahra<sup>1</sup>, Henny Yulsiati<sup>2</sup>, Siska Aprianti<sup>3</sup>**  
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya<sup>1,2</sup>  
zahraaisyah1301@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to “determine the effect of local revenue, balancing funds, capital expenditure and budget financing surplus on financial performance in Provinces on the Island of Sumatra. This study is a quantitative study using secondary data obtained from the official website [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). The population in this study were 10 Provinces on the Island of Sumatra with a total sample of 50. The selection of this research sample used the saturated sample technique found in Non-Probability Sampling. This study uses descriptive statistical analysis tools, selection of panel data regression models and classical assumption tests with Eviews 12 and Microsoft Excel. Based on the results of the study, it is known that partially Local Revenue and Balancing Funds have a significant effect on Financial Performance. Conversely, Capital Expenditure and Budget Financing Surplus do not affect Financial Performance in Provinces on the Island of Sumatra.”*

**Keywords:** Local Original Income, Balanced Funds, Capital Expenditure, Budget Financing Surplus, Financial Performance

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Populasi dalam penelitian ini adalah 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan total sampel sebanyak 50. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yang terdapat di *Non-Probability Sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel dan uji asumsi klasik dengan Eviews 12 dan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sebaliknya Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Provinsi di Pulau Sumatera.”

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Kinerja Keuangan

**PENDAHULUAN**

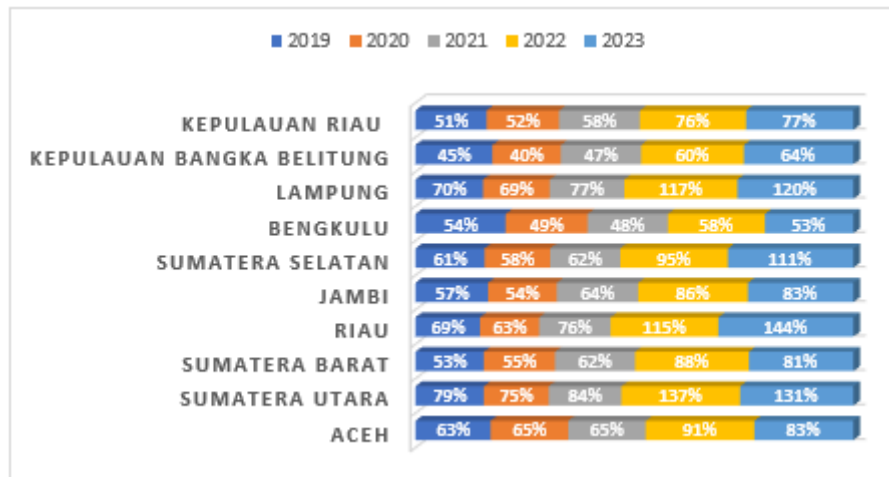
Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengontrol lembaga dan kepentingan masyarakat diungkapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan dasar hukum otonomi daerah di Indonesia.

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memainkan peran kunci sebagai salah satu perwakilan pemerintah pusat di daerah. Hal ini dikarenakan, selain menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungannya, pemerintah daerah juga memiliki sebagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memanfaatkan daerahnya dan, pada akhirnya, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kapasitas daerah untuk menjalankan otonomi daerah dapat dilihat, misalnya, dengan melihat kinerja keuangan mereka. Hal ini dapat dievaluasi dengan melihat kapasitas daerah dalam mencari dan mengembangkan sumber daya keuangan, dengan tujuan untuk meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Novita & Arza, 2024). Kapasitas pemerintah daerah untuk memeriksa kinerja keuangannya sendiri dan menggali potensi daerahnya merupakan salah satu indikator kinerja keuangannya, seperti halnya keakuratan Laporan Realisasi Anggaran yang merinci kemampuan pemerintah untuk melakukannya. Beberapa evaluasi rasio keuangan yang dapat dilakukan, seperti yang dinyatakan oleh Mahmudi (2019), antara lain:

1. Derajat Desentralisasi
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
5. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai rasio keuangan di provinsi di Sumatera, penulis penelitian ini menetapkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen (terikat) dan alat untuk mengukur kesehatan fiskal pemerintah daerah. Seluruh provinsi di Sumatera memiliki kemandirian keuangan yang baik, berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang merupakan nilai tertinggi dan menunjukkan skala interval di atas 50% dengan kemampuan daerah yang sangat baik. Persentase yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin tidak bergantung pada transfer dari pemerintah federal untuk mengelola anggaran mereka.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat ditemukan dengan membagi total pendapatan dari sumber-sumber daerah (pendapatan asli daerah) dengan total pendapatan yang diterima dari transfer federal dan provinsi serta pinjaman daerah (seperti yang dinyatakan oleh Mahmudi, 2019). Otonomi keuangan yang lebih besar dari pemerintah daerah ditunjukkan oleh rasio yang lebih besar. Rasio kemandirian provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Rasio Kemandirian Daerah Provinsi di Pulau Sumatera**  
 Sumber: LKPD Provinsi di Pulau Sumatera (Data Diolah, 2025)

Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, berdasarkan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi (Gambar 1). Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan rasio kemandirian sebesar 40 hingga 50%. Tabel 1 menampilkan rasio kemandirian keuangan daerah dalam skala interval:

**Tabel 1. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Persentase	Kemampuan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma et al., 2010)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu variabel yang diyakini dapat mempengaruhi kinerja keuangan Provinsi Sumatera. Dalam hal pembiayaan daerah otonom, PAD adalah yang paling penting. Kelima provinsi di Sumatera-Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung-mengalami peningkatan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan untuk mendanai pembangunan secara mandiri dari pemerintah pusat meningkatkan kinerja keuangan daerah seiring dengan meningkatnya PAD (Halim, 2020). Digdowiseiso dkk. (2022) menemukan bahwa PAD secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah. Ratnasari dan Meirini (2022) tidak menemukan bukti bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk menyamakan kedudukan anggaran antar daerah. Peningkatan dana ini berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, jika salah kelola, dana perimbangan dapat menyebabkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemandirian keuangan (Mardiasmo, 2018). Provinsi di Pulau Sumatera berhasil mengurangi ketimpangan fiskal daerah dengan cukup baik pada tahun 2023, yang ditunjukkan dengan penurunan realisasi Dana Perimbangan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Berkurangnya ketergantungan terhadap transfer pusat, yang ditunjukkan dengan rendahnya dana perimbangan, mengindikasikan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Menurut penelitian sebelumnya (Novita & Arza, 2024). Dalam hal kinerja keuangan, Dana Perimbangan merupakan penghambat utama. Namun demikian, menurut penelitian (Rustiyani et al., 2023), dana perimbangan justru meningkatkan kinerja keuangan.

Banyak faktor, termasuk infrastruktur yang memadai, yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Belanja Modal adalah kategori anggaran yang ditetapkan dalam kerangka APBD untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi belanja modal yang efektif dikaitkan dengan kinerja keuangan yang lebih baik di daerah. Belanja modal membantu meningkatkan kinerja daerah dengan berinvestasi pada infrastruktur dan aset produktif. (Yusof, 2019). Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan yang terletak di Pulau Sumatera mengalami penurunan realisasi belanja modal pada tahun 2023, meskipun secara keseluruhan belanja modal di provinsi tersebut tetap tinggi. Kinerja keuangan pemerintah diyakini dipengaruhi oleh belanja modal yang merupakan salah satu komponennya. Sebuah studi yang dilakukan di Sumatera Utara menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Yulsiati et al., 2023). Meskipun demikian, temuan dari studi di kabupaten di Jawa Barat (Fitriani & Syarif, 2025) mengindikasikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah.

Salah satu indikator kinerja keuangan daerah adalah efisiensi daerah dalam menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan (Mahmudi, 2019). Jika nilai SILPA adalah nol, hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah dapat menggunakan dana saat ini untuk menutupi kesenjangan anggaran, sehingga memungkinkan penggunaan anggaran yang optimal dan meningkatkan kinerja keuangan. Pada tahun 2023, komponen SILPA di provinsi Sumatera mengalami penurunan yang cukup besar, yang berarti bahwa dana dari SILPA telah dimanfaatkan dengan baik untuk menutupi defisit anggaran dan dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja keuangan. Inilah sebabnya, menurut penelitian (Ratnasari & Meirini, 2022), SILPA memiliki dampak negatif yang substansial terhadap kinerja keuangan pemerintah dan dengan demikian dianggap sebagai elemen terakhir yang mempengaruhi kinerja tersebut. Tidak ada korelasi antara SILPA dan keberhasilan fiskal pemerintah, menurut penelitian (Putri & Ratnawati, 2023) yang melihat masalah ini.

Penelitian sebelumnya mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan keuangan pemerintah daerah menghasilkan kesimpulan yang

bertentangan. Karena kurangnya penelitian sebelumnya tentang masalah ini, penulis mengisi kekosongan pengetahuan dengan memilih semua provinsi di Sumatera untuk penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mencakup satu provinsi, daerah, atau kota. Kami akan mengevaluasi kembali dampak pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengisi kekosongan penelitian dan memberikan penjelasan atas penelitian-penelitian sebelumnya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Agensi**

Sebuah "*nexus of contact*" adalah interaksi kooperatif antara figur yang memiliki wewenang (prinsipal) dan orang yang diberi wewenang (agen), seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan. Dalam hubungan keagenan, prinsipal dan agen setuju bahwa agen akan memiliki wewenang pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan muncul dalam organisasi publik ketika pemerintah bertindak sebagai agen dan masyarakat, yang bertindak sebagai prinsipal, mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah dengan imbalan barang dan jasa publik. Menyadari adanya hubungan keagenan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, teori keagenan memberikan kerangka kerja untuk memahami organisasi sektor publik (Halim & Abdullah, 2006).

Masyarakat mungkin meragukan kebenaran klaim pemerintah daerah bahwa mereka bertindak untuk kepentingan terbaik mereka, meskipun teori keagenan menyatakan bahwa entitas-entitas tersebut seharusnya bertindak demikian. Pemerintah federal dan masyarakat umum berperan sebagai prinsipal dalam penelitian ini, dengan kepercayaan penuh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan semua undang-undang yang relevan. Masyarakat harus dapat mengawasi dan menilai seberapa baik pemerintah daerah mereka menangani keuangan mereka jika mereka menginginkan lebih banyak otonomi di bidang ini. Dalam kerangka kerja keuangan daerah, adalah tanggung jawab pemerintah pusat (yang bertindak sebagai kepala sekolah) untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan masyarakat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai agen. Di sisi lain, kesulitan keagenan muncul ketika dua pihak yang terlibat dalam interaksi memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Ketika pihak utama (pemerintah pusat atau masyarakat) mengharapkan agen (pemerintah daerah) untuk selalu mengikuti arahannya, maka terjadilah masalah keagenan.

Salah satu contohnya adalah kemungkinan bahwa uang daerah akan digunakan untuk kepentingan khusus daripada untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Di sini, teori keagenan membantu menjelaskan mengapa tindakan agen tidak selalu selaras dengan tujuan pemerintah pusat, yang sebagai prinsipal, mengupayakan administrasi anggaran yang terbuka dan efektif. Penelitian ini akan menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah, dalam perannya sebagai agen, menangani berbagai sumber daya moneter, termasuk PAD, dana perimbangan, dan belanja modal.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai pendapatan asli daerah, yang dikumpulkan untuk kepentingan kegiatan rutin dan pembangunan daerah. Dalam hal pembiayaan daerah otonom, PAD adalah sumbernya. Kemampuan untuk mendanai pembangunan secara mandiri dari pemerintah pusat akan meningkatkan kinerja keuangan daerah seiring dengan meningkatnya PAD (Halim, 2020). Sehingga pendapatan asli daerah berkorelasi positif dengan kinerja keuangan Pendapatan asli daerah secara signifikan dan positif mempengaruhi kinerja keuangan daerah, sesuai dengan penelitian Digdowiseiso dkk., (2022) dan Safitri dkk., (2022). Penelitian mengenai hubungan antara Kinerja Keuangan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah perlu diteliti lebih lanjut mengingat hal tersebut di atas. Dengan demikian, hipotesis utama penelitian ini adalah:

**H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

### **2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan**

Untuk mendukung kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu faktor yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur ketergantungan mereka terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya adalah dana perimbangan, yang merupakan bagian dari pendapatan daerah (Maulina et al., 2021). Tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk meratakan anggaran daerah; namun, jika dana ini salah kelola, maka dapat menimbulkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki otonomi keuangan (Halim, 2020). Mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat, yang ditunjukkan dengan rendahnya dana perimbangan, mengindikasikan kemandirian keuangan yang lebih besar bagi daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novita & Arza (2024) dan Prastiwi & Aji (2020), terdapat korelasi negatif yang kuat antara jumlah uang yang diterima daerah dari Dana Perimbangan pemerintah pusat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Penulis termotivasi untuk menguji kembali hubungan antara variabel Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan berdasarkan penjelasan di atas. Hal ini membawa kita pada hipotesis kedua:

**H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

### **3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan**

Sebagian dari belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal untuk mendanai pengembangan aset tetap di daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13/2006. Menurut Halim (2007), belanja modal mencakup berbagai jenis aset tetap, termasuk tanah, peralatan, bangunan, jalan, sistem irigasi, dan mesin. Pengeluaran untuk infrastruktur dan aset meningkatkan kinerja keuangan; daerah yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengalokasikan

belanja modal akan memiliki kinerja keuangan yang baik (Mahmudi, 2019). Ratnasari dan Meirini (2022) menemukan bahwa daerah dengan nilai belanja modal yang tinggi memiliki nilai kinerja keuangan yang lebih buruk.

Baik Yulsiati dkk. (2023) maupun Maulina dkk. (2021) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja spasial daerah. Penjelasan tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk mengevaluasi kembali hubungan antara Kinerja Keuangan dengan variabel Belanja Modal. Hal ini membawa kita pada hipotesis ketiga:

**H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

**4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan**

(Mahmudi, 2019) menyatakan bahwa efisiensi daerah dalam mengelola anggarannya, khususnya pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk pelayanan publik dan pembangunan, menjadi tolak ukur keberhasilan keuangan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah jumlah yang tersisa setelah dikurangi pembiayaan neto dari surplus atau defisit anggaran. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, nilai SILPA dalam APBD/APBN haruslah nol. Hal ini mengindikasikan bahwa uang yang ada di daerah tersebut dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan anggaran dan memaksimalkan pemanfaatan anggaran.

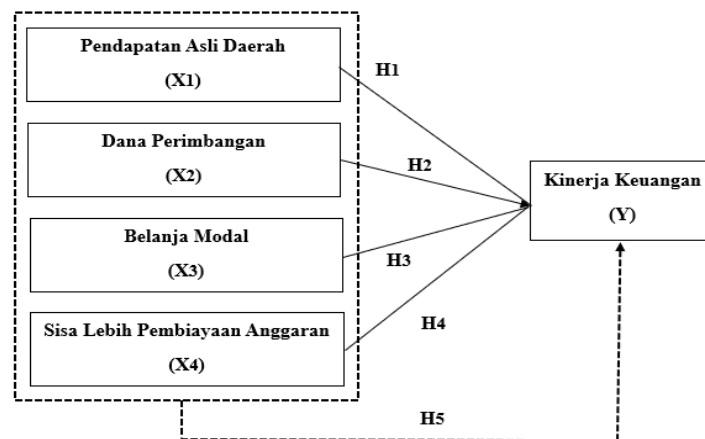
Anggaran sektor publik dipengaruhi oleh SILPA, menurut penelitian (Fitriani & Syarif, 2025) dan (Ratnasari & Meirini, 2022). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis terdorong untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara Kinerja Keuangan dengan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

**H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

**5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan**

Dengan menguji hipotesis ini, kita dapat melihat apakah faktor-faktor independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen ketika diambil secara keseluruhan. Hal ini digunakan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara Kinerja Keuangan dengan variabel-variabel berikut: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Berdasarkan. Dengan demikian, hipotesis keenam penelitian ini adalah:

**H5: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**



**Gambar 2. Kerangka Konseptual**  
 Sumber: Data Diolah, 2025

## METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, adalah pendekatan untuk mempelajari populasi dan sampel yang mengandalkan pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Akan ada hubungan sebab-akibat antara variabel independen (X) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran dengan variabel dependen (Y) kinerja keuangan pemerintah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi di Pulau Sumatera berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan teknik dokumentasi. Semua informasi tersebut diperoleh langsung dari *website* BPK RI atau Badan Pemeriksa Keuangan.

Analisis regresi linier akan digunakan untuk melakukan pendekatan analisis data ini. Namun, sebelumnya akan dilakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pemilihan model regresi data panel. Data dianalisis dengan menggunakan Excel dan alat bantu Econometric Views (Eviews) 12. Lima puluh sampel digunakan dalam penelitian ini. Dari tahun 2019 hingga 2023, sebanyak sepuluh provinsi di Pulau Sumatera akan digunakan untuk menentukan ukuran sampel.

**Tabel 2. Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera yang laporan keuangannya telah diaudit tahun 2019 – 2023	10
2.	Jumlah tahun penelitian	5
	<b>Total Pengamatan Sampel</b>	<b>50</b>

Sumber: Data Diolah, 2025

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Setiap variabel dapat dijelaskan menggunakan statistik deskriptif. Metrik ringkasan umum yang berasal dari statistik deskriptif meliputi rata-rata, median, minimum, dan deviasi standar. Temuan statistik deskriptif variabel penelitian ditampilkan pada Tabel 3:

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

	PAD	DP	BM	SILPA	KKPD
Mean	12.37436	12.51220	11.96993	11.47788	73898.76
Median	12.42063	12.50159	11.98506	11.51274	65003.50
Maximum	12.86082	12.87611	12.49997	12.59875	143809.0
Minimum	11.83470	12.15459	11.51100	10.46348	39692.00
Std. Dev.	0.281437	0.196885	0.254646	0.468392	24796.93

Sumber: *Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Uji Pemilihan Model Data Panel**

**Uji Chow**

Probabilitas *cross-section* adalah 0,0021 dan statistik *cross-section* F adalah 2,723227, menurut Uji Chow. Ternyata, nilai Probabilitas *Cross-section* lebih rendah dari 0.05 ( $0.0021 < 0.05$ ) menurut hal ini. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* merupakan pilihan yang optimal untuk data panel ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.723227	(9,36)	0.0156
Cross-section Chi-square	25.963693	9	0.0021

Sumber: *Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Uji Hausman**

Menurut Uji Hausman, nilai Probabilitas *Cross-section Random* adalah 0.0025 dan nilai Chi-Square Statistics *Cross-section Random* adalah 16.381366. Nilai probabilitas *cross-section random* kurang dari 0.05 ( $0.0025 < 0.05$ ), berdasarkan hal ini. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* merupakan pilihan yang optimal untuk data panel ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	16.381366	4	0.0025

Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025

**Hasil Regresi dengan FEM**

Jelaslah bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model data panel yang terbaik berdasarkan hasil dari kedua pengujian tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah hasil regresi yang diperoleh dengan menggunakan model data panel, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM):

**Tabel 6. Hasil Regresi dengan FEM**

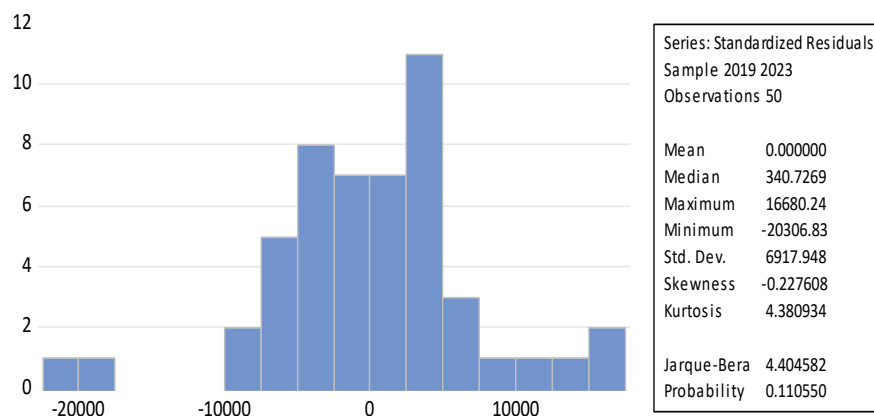
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1267384.	468938.5	-2.714200	0.0101
PAD	217934.0	20281.10	10.74587	0.0000
DP	-120654.0	25545.38	-4.723127	0.0000
BM	17031.15	13205.12	1.289738	0.2054
SILPA	-4334.070	3959.440	-1.094617	0.2810

Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Kita tahu bahwa uji Jarque-Bera (J-B) untuk normalitas menghasilkan temuan positif; khususnya, nilai probabilitasnya adalah 0.110550, yang lebih dari 0.05 (0.110550 > 0.05). Dengan demikian, data diasumsikan mengikuti distribusi normal.



**Gambar 3. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas membuktikan bahwa variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran) memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Hal ini membuat kami yakin bahwa model regresi data penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.922105	5263.738	NA
PAD	0.002704	12537.59	6.352383
DP	0.004630	21944.49	5.323655
BM	0.001370	5942.457	2.634446
SILPA	0.000171	684.1256	1.114677

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Uji Autokorelasi**

Dengan tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05, jumlah sampel 50 ( $n = 50$ ), dan empat variabel independen ( $k = 4$ ), nilai Durbin-Watson (DW) dapat digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa  $Du < DW < 4 - Du = 1,7214 < 2,0949 < 2,2786$  karena nilai DW sebesar 2,0949 berada di antara nilai  $dU$  sebesar 1,7214 dan  $4-dU$ , yaitu 2,2786. Hal ini membuktikan bahwa autokorelasi tidak menjadi masalah.

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.380072	Mean dependent var	1.83E-10
Adjusted R-squared	0.293570	S.D. dependent var	8968.943
S.E. of regression	7538.342	Akaike info criterion	20.82257
Sum squared resid	2.44E+09	Schwarz criterion	21.09025
Log likelihood	-513.5642	Hannan-Quinn criter.	20.92450
F-statistic	4.393810	Durbin-Watson stat	2.094904
Prob(F-statistic)	0.001513		

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Uji Heterokedastisitas**

Telah diketahui bahwa nilai probabilitas dihasilkan oleh uji heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi yang diuji dapat disimpulkan dari nilai chi-square sebesar 0.2112 yang lebih besar dari  $\alpha$  0.05 ( $0.2112 > 0.05$ ).

**Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test White  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.403014	Prob. F(10,39)	0.2152
Obs*R-squared	13.22846	Prob. Chi-Square(10)	0.2112
Scaled explained SS	71.60383	Prob. Chi-Square(10)	0.0000

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai-nilai yang diketahui sebagai berikut: Konstanta = -126.764, Koefisien Pendapatan Asli Daerah = 21.7934,0, Koefisien Dana Perimbangan = -120.654,0, Koefisien Belanja Modal = 17031,15, dan Koefisien Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran = -4334,070. Setelah itu, kita bisa mendapatkan solusi persamaan dengan cara ini:

$$KKP = 217934.0PAD + -120654.0DP + 17031.15BM + -4334.070SILPA + \epsilon$$

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan tersebut:

1. Tingkat Kinerja Keuangan sebesar -1267364 akan terjadi jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
2. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya konstan, maka kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 217934.0, sesuai dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 217934.0.
3. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap, maka koefisien Dana Perimbangan sebesar -120654.0 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan Kinerja Keuangan sebesar -120654.0.
4. Dengan asumsi semua variabel independen lain nilainya tetap, maka setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 17031.15, sesuai dengan koefisien 17031.15.
5. Dengan asumsi semua variabel independen lainnya bernilai tetap, maka setiap kenaikan 1% pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran akan diiringi dengan kenaikan Kinerja Keuangan sebesar -4334.070, sesuai dengan koefisien Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

**Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1267364.	466938.5	-2.714200	0.0101
PAD	217934.0	20281.10	10.74567	0.0000
DP	-120654.0	25545.36	-4.723127	0.0000
BM	17031.15	13205.12	1.289738	0.2054
SILPA	-4334.070	3959.440	-1.094617	0.2810

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil uji koefisien determinasi khususnya nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.894060 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera jika digabungkan. Sisanya sebesar 10,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Oleh karena itu, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	0.922167	Mean dependent var	73898.76
Adjusted R-squared	0.894060	S.D. dependent var	24796.93
S.E. of regression	8070.997	Akaike info criterion	21.06144
Sum squared resid	2.35E+09	Schwarz criterion	21.59680
Log likelihood	-512.5359	Hannan-Quinn criter.	21.26531
F-statistic	32.80981	Durbin-Watson stat	1.150083
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen, peneliti menggunakan uji T. Taraf signifikansi sebesar 0,05 dan dua sisi digunakan untuk melakukan pengujian. Dalam pengujian dua sisi dengan derajat kebebasan  $df = n - k - 1$ , kita menginginkan T tabel pada tingkat signifikansi  $0,05/2 = 0,025$ . Hipotesis kerja dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera
- H3 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera
- H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera”

**Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1267364.	466938.5	-2.714200	0.0101
PAD	217934.0	20281.10	10.74567	0.0000
DP	-120654.0	25545.36	-4.723127	0.0000
BM	17031.15	13205.12	1.289738	0.2054
SILPA	-4334.070	3959.440	-1.094617	0.2810

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

Berikut ini adalah hasil dari uji-t, yang merupakan uji signifikansi parsial, seperti yang ditunjukkan pada tabel.14:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan *output* “Eviews 12 dapat dilihat t hitung sebesar 10.74567. Dengan penentuan t tabel dicari pada signifikansi 0.05, dengan derajat kebebasan  $df = n - k - 1$  atau  $50 - 4 - 1 = 45$ . Hasil diperoleh untuk t tabel

sebesar 2.014/-2.014. Berdasarkan hal tersebut, nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel (10.74567  $>$  2.014) maka **H1 diterima**.

Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.0000 pada uji  $t$ . Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 (0.0000  $<$  0.05) maka **H1 diterima** dengan hasil berpengaruh secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan *output* Eviews 12 dapat dilihat  $t$  hitung sebesar -4.723127. Dengan penentuan  $t$  tabel dicari pada signifikansi 0.05, dengan derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $50-4-1 = 45$ . Hasil diperoleh untuk  $t$  tabel sebesar 2.014/-2.014. Berdasarkan hal tersebut, nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel (-4.723127  $>$  -2.014) maka **H2 diterima**.

Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.0000 pada uji  $t$ . Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 (0.0000  $<$  0.05) maka **H2 diterima** dengan hasil berpengaruh secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan *output* Eviews 12 dapat dilihat  $t$  hitung sebesar 1.289649. Dengan penentuan  $t$  tabel dicari pada signifikansi 0.05, dengan derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $50-4-1 = 45$ . Hasil diperoleh untuk  $t$  tabel sebesar 2.014/-2.014. Berdasarkan hal tersebut, nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel (1.289738  $<$  2.014) maka **H3 ditolak**.

Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.2054 pada uji  $t$ . Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0.05 (0.2054  $>$  0.05) maka **H3 ditolak** dengan hasil tidak berpengaruh secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan *output* Eviews 12 dapat dilihat  $t$  hitung sebesar -1.094617. Dengan penentuan  $t$  tabel dicari pada signifikansi 0.05, dengan derajat kebebasan  $df=n-k-1$  atau  $50-4-1 = 45$ . Hasil diperoleh untuk  $t$  tabel sebesar 2.014/-2.014. Berdasarkan hal tersebut, nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel (-1.094617  $<$  -2.014) maka **H4 ditolak**.

Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.2809 pada uji  $t$ . Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0.05 (0.2809  $>$  0.05) maka **H4 ditolak** dengan hasil tidak berpengaruh secara signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Provinsi di Pulau Sumatera.

**Uji Simultan (Uji F)**

Nilai f hitung sebesar 32,80981 diketahui sebagai hasil dari uji signifikansi simultan (uji f) pada Eviews 12. Dengan derajat kebebasan  $n-k-1 = 50-4-1 = 45$ , dan tingkat signifikansi 0,05, kita dapat mencarinya pada tabel f dengan cara menentukannya. nilai f tabel adalah 2,579 ketika kita mengetahui bahwa k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah data yang diuji. Singkatnya, f hitung > f tabel ( $32.80981 > 2.579$ ). Pada hasil uji signifikansi simultan (uji f) diketahui nilai probabilitas F sebesar 0.0000 dengan ketentuan kurang dari 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ), mengindikasikan bahwa hasil temuan berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan data tersebut, jelaslah bahwa faktor-faktor berikut ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan provinsi di Sumatera: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Faktor-faktor ini dapat dipertimbangkan secara individual atau kombinasi.

**Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

R-squared	0.922167	Mean dependent var	73898.76
Adjusted R-squared	0.894060	S.D. dependent var	24796.93
S.E. of regression	8070.997	Akaike info criterion	21.06144
Sum squared resid	2.35E+09	Schwarz criterion	21.59680
Log likelihood	-512.5359	Hannan-Quinn criter.	21.26531
F-statistic	32.80981	Durbin-Watson stat	1.150083
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Output Data Diolah (Eviews 12), 2025*

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan provinsi-provinsi di Sumatera sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja keuangan suatu daerah meningkat secara proporsional dengan pendapatan asli daerah (PAD). Terdapat korelasi positif antara PAD dan kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera sering menggunakan pendapatan ini untuk mendanai inisiatif-inisiatif daerah, termasuk inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan asli daerah (PAD) menentukan sejauh mana layanan publik dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Secara spesifik dinyatakan bahwa Kinerja Keuangan suatu daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya PAD (Yulsiati et al., 2023; Digdowniseiso et al., 2022; Safitri et al., 2022). Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan dalam penelitian Ratnasari & Meirini (2022) dan Rustiyani dkk. (2023) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

**Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan**

Mengurangi besarnya dana perimbangan pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja keuangan mereka karena dampak negatif dana perimbangan

terhadap keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan konstituen mereka sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan dari pemerintah federal. Ketika pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, rakyat diuntungkan.

Konsisten dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan yang lebih kecil menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik bagi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Digdowiseiso dkk. (2022), Prastiwi & Aji (2020), dan Novita & Arza (2024) yang menemukan hubungan yang sama antara dana perimbangan dan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian Rustiyani dkk. (2023) dan Maulina dkk. (2021) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan meningkatkan Kinerja Keuangan.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan**

Tingkat belanja modal yang lebih besar mengindikasikan kinerja keuangan yang buruk dari pemerintah daerah karena belanja modal tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera belum melakukan distribusi belanja modal dengan baik, karena belanja modal di provinsi ini masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pengeluaran untuk belanja modal dan infrastruktur yang meningkatkan layanan masyarakat cenderung lebih rendah dalam anggaran pemerintah daerah dibandingkan dengan pengeluaran rutin.

Konsisten dengan penelitian lain, penelitian ini menemukan bahwa belanja modal tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Fitriani & Syarif, 2025; Fernandes & Putri, 2022; Rustiyani et al., 2023). Namun penelitian Prastiwi dan Aji (2020) dan Yulsiati dkk. (2023) menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi keberhasilan keuangan, sehingga hal ini bertentangan dengan penelitian ini.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan**

Pemerintah provinsi di Sumatera tidak sepenuhnya terpengaruh oleh kinerja keuangan SILPA karena sisa lebih pembiayaan anggaran tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Fakta bahwa jumlah SILPA yang lebih sedikit dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa pembiayaan sudah cukup untuk kegiatan dan defisit anggaran yang telah ditutupi, sehingga tidak memerlukan dana tambahan.

Konsisten dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Putri & Ratnawati, 2023). Di sisi lain, hal ini bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh Fitriani dan Syarif (2025) yang menemukan bahwa jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga semakin banyak sisa lebih pembiayaan anggaran berarti kinerja keuangan yang lebih baik.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan**

Kinerja Keuangan di Provinsi-provinsi di Sumatera Dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Surplus Pembiayaan Anggaran, menurut temuan studi ini. Keempat ukuran kinerja keuangan ini-pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan surplus pembiayaan anggaran-memiliki pengaruh sebesar 89,4 persen ketika dipertimbangkan secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan keuangan. Kinerja keuangan provinsi-provinsi di Sumatera juga akan meningkat karena meningkatnya PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Ratnasari & Meirini (2022) dan Fitriani & Syarif (2025) yang menemukan bahwa variabel-variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan. Jika PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA naik, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan naik.

**KESIMPULAN**

Temuan studi kami adalah sebagai berikut, berdasarkan data dan analisis:

1. Secara parsial “Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Provinsi di Pulau Sumatera. Dana Perimbangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Provinsi di Pulau Sumatera. Belanja Modal (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Provinsi di Pulau Sumatera. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada Provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera tidak lepas dari peran Pemerintah yang dapat dengan baik mengelola dan mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.”

**SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memastikan Provinsi di Pulau Sumatera terus mencapai Kinerja Keuangan yang semakin membaik, disarankan agar Pemerintah Daerah mempertahankan kemampuannya dalam menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara efektif dan efisien.
2. Pencapaian kemajuan dan pembangunan daerah mengharuskan Pemerintah Daerah di Provinsi di Pulau Sumatera untuk mahir dalam operasional belanja

modal. Belanja modal harus dikelola oleh pemerintah daerah secara bertanggung jawab dan transparan, setelah melalui perencanaan pertumbuhan yang optimal. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi indikator pengelolaan fiskal yang kuat di tingkat daerah dan menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan perbaikan di daerah sekitarnya.

3. Menganalisis kinerja keuangan dalam hal laporan realisasi anggaran (LRA) adalah subjek eksklusif dari penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier. Para peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memasukkan wawancara dengan manajer keuangan daerah atau studi kasus mendalam di daerah tertentu ke dalam pendekatan metode campuran untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bisma, Gede, D. I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara*, 4.
- Digdowniseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, D. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. *Jurnal Ilimiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 2572–2580.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Reveneue*, 3(10), 198–209.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan SiLPA terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Barat tahun 2016-2023. *ECo-Fin*, 7(1), 334–348. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan dan Keuangan Daerah*. Andi Publisher.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 430–443. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Prastiwi, D. N., & Aji, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *JURNAL KAJIAN BISNIS*, 28, 89–105.

Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesya*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>

Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan*. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Rustiyani, N., Sukma, I., & Barus, L. (2023a). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 6, Issue 2). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Rustiyani, N., Sukma, I., & Barus, L. (2023b). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 6, Issue 2). <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>

Safitri, W. B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal EK&BI*, 5.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

Yulsiati, H., Dwiyantri, Y., & Ginting, A. J. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7, 315–320.